



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2022**

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1. PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas sebagai lembaga penyelenggaraan pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

1.1.1. Latar Belakang

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas mengemban 2 (dua) krida dari Hasta Krida Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
2. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;

Tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas adalah meningkatkan produksi tanaman pertanian, meningkatkan penguatan cadangan pangan dan meningkatkan ketersediaan pangan utama. Sedangkan Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas adalah meningkatnya ketahanan pangan, meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian, meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, meningkatnya produksi tanaman perkebunan serta meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, Sumber Daya Manusia Pertanian dan akses pasar.

Untuk itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD Tahun 2018-2023, Renstra, Renja maupun Perjanjian Kinerja.

1.1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.

1.1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

1.1.4. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan

pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;

- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

1.1.5. Ruang Lingkup

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP untuk tahun 2021 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas: (1) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; (2) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; (3) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi; (4) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota; (5) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota; (6) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian; (7) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota; (8) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian; (9) Pembangunan Prasarana Pertanian; dan (10) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah).

1.1.5.1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan RTP Tahun 2021 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini dilakukan karena pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Banyumas akan menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di mana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan.
 - a. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan;
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik;

2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- 2) Sub kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan;
- 3) Sub kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dari Toko Tani Indonesia;

b. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi :

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun;
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun;
- 3) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

a. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota :

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang

Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota :
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
 - a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian :
 - 1) Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian;
 - 2) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
 - b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota :
 - 1) Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman;
6. Program Penyuluhan Pertanian
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;

- 2) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
- 3) Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota;
- 4) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;

7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

a. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani.
- 2) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian.
- 3) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.
- 4) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit.
- 5) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage.
- 6) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya.
- 7) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pertanian Lainnya.

8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota :

- 1) Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- 2) Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan atas :

- Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
- Penilaian risiko strategis OPD; dan
- Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian :

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit :

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Rencana

monitoring atas perbaikan/pembuatan kebijakan dan prosedur serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur hasil revisi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi resiko-resiko, harus ditetapkan agar kegiatan pengendalian yang akan dilakukan monitoring atau evaluasi dapat tercapai dengan baik.

2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut :

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Kurang Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Kurang Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Kurang Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Kurang Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian tersebut di atas, 3 sub unsur memadai sedangkan 5 sub unsur lainnya kurang memadai. Adapun kelemahan-kelemahan pada 5 sub unsur yang ada yaitu :

1) Pada Sub unsur Penegakan Integritas dan Nilai Etika

- Kelemahan :

- a. Belum ada fungsi khusus didalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku /kode etik.

2) Pada Sub Kepemimpinan yang Kondusif

- Kelemahan :

- a. Gaya pimpinan belum dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja.

- 3) Pada Sub Unsur Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan kebutuhan
 - Kelemahan :
 - a. Pegawai yang bertugas di OPD sebagian besar bukan pegawai tetap karena kurangnya SDM ASN sehingga banyak terdapat pegawai honorer yang bersifat ad hoc (sementara);
- 4) Pada Sub Unsur Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Yang Tepat
 - Kelemahan :
 - a. Kewenangan belum direviu secara periodik
- 5) Pada Sub Unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia
 - Kelemahan :
 - a. Alokasi anggaran untuk pengembangan SDM kurang memadai;
 - b. Belum adanya reward dan/atau penushment atas pengelolaan resiko (Misal mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan resiko dalam penilaian kinerja);

3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu :

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika		
	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	Kepala Dinas	Triwulan I , II, III, IV Tahun 2022

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
2	Kepemimpinan yang kondusif		
	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	Kepala Dinas	Triwulan I , II, III, IV Tahun 2022
	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	Kepala Dinas	Triwulan I , II, III, IV Tahun 2021
3	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan Kebutuhan		
	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	Kepala Dinas	Triwulan I , II, III, IV Tahun 2021
4.	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat		
	Kewenangan direviu secara periodik	Kepala Dinas	Tahun
5	Penyusunan dan Penetapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan SDM		
	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	Kepala Dinas	Triwulan I , II, III, IV 2021
	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	Kepala Dinas	Triwulan I , II, III, IV Tahun 2021

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I :

- Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)*
- Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Pertanian dan*

Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas

*Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian
Intern Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Banyumas*

BAB IV

PENILAIAN RISIKO

4.1. Penetapan Konteks/Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Bupati Banyumas Periode 2018-2023 telah menetapkan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD. Visi tersebut adalah “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 8 (delapan) misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;
- b. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
- e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;

- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;
- h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Kedelapan misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas mendukung misi ke-3 dan ke-4 Bupati Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu :

- a) misi ke-3 “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan”
- b) misi ke-4 “Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor kedalutan Pangan”.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

No	Konteks	Tujuan Strategis/ Kegiatan	Sasaran	Indikator
1.	Risiko strategis Pemerintah Daerah	a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan

No	Konteks	Tujuan Strategis/ Kegiatan	Sasaran	Indikator
		b. Meningkatkan Ketahanan Pangan melalui sektor agribisnis	Meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agribisnis untuk ketersediaan pangan utama	1. Persentase Ketersediaan Pangan Utama 2. Persentase Penguatan Cadangan Pangan
2.	Risiko strategis OPD	Meningkatkan penguatan cadangan pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Persentase Penguatan cadangan pangan
		Meningkatkan ketersediaan pangan utama	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian	Persentase Ketersediaan Pangan Utama
		Meningkatkan Produksi Tanaman Pertanian	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian
			Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan	
			Meningkatnya produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura	
			Meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, Sumber Daya Manusia Pertanian, dan akses pasar	
		(Tujuan dalam Renstra DINPERTAN KP Kab. Banyumas)	(Sasaran dalam Renstra DINPERTAN KP Kab. Banyumas)	
3.	Risiko operasional/ Kegiatan OPD	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lokasi kemandirian pangan

No	Konteks	Tujuan Strategis/ Kegiatan	Sasaran	Indikator
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Jumlah kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
				1. Jumlah kegiatan Penetapan target konsumsi pangan Jumlah Kegiatan Pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan
		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah desa rawan pangan yang ditangani
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan pembinaan dan survey pengamanan pangan
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		-

		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		1. Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian untuk pembinaan kelembagaan petani yang dilaksanakan
				2. Jumlah kegiatan pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan 3. Jumlah kegiatan Training Penyuluh Pertanian 4. Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani diKecamatan dan Desa melalui penyuluhan pertanian
		Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah Jenis Infrastruktur di Bidang Pertanian
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten
		(Kegiatan dalam Renja DINPERTAN KP Kab. Banyumas)		

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

Form 2.a : Penetapan konteks risiko strategis Pemda

Form 2.b : Penetapan konteks risiko strategis OPD

*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Banyumas*

*Form 2.c : Penetapan konteks risiko operasional Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas*

4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh 19 risiko dengan rincian sebagai berikut :

No	Pernyataan Risiko
A.	Risiko Strategis OPD
1	Kurangnya data yang tersedia untuk penyusunan Pola Pangan Harapan dan Neraca Bahan Makanan
2	Terbatasnya cadangan pangan pemerintah daerah
3	Petani tidak memperoleh informasi yang memadai tentang adanya perlindungan bagi usaha taninya melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
4	Meningkatnya luasan lahan pertanian yang mengalami kerusakan

	tanaman
5	Meningkatnya luasan lahan pertanian yang mengalami kekeringan
6	Tanaman perkebunan banyak yang sudah tidak produktif
7	Rendahnya penguasaan teknik budidaya tanaman pangan
8	Kurangnya minat petani terhadap komoditas hortikultura

No	Pernyataan Risiko
9	Pengetahuan tentang teknik budidaya masih kurang
10	Rendahnya pengetahuan pengelolaan usaha agribisnis
C	Risiko Operasional/Kegiatan OPD
Penanganan Daerah rawan Pangan	
1	Bertambahnya masyarakat terdampak daerah rawan pangan
2	Tidak tertanganinya masyarakat terdampak rawan pangan
3	Kurangnya kemampuan produktif sumberdaya manusia
Pendukung Kegiatan TNI (TMMD) untuk Kegiatan Pertanian	
1	Kebutuhan masyarakat TNI TMMD akan sektor pertanian yang cukup bervariasi
Pengembangan Desa Mandiri dan Lumbung Pangan	
1	Kurang optimalnya kelembagaan Lumbung Pangan, Lembaga Usaha Pangan Masyarakat dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	
1	Terbatasnya gudang cadangan pangan pemerintah
Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan dan Diversifikasi Pangan	
1	Kurangnya sarana prasarana pengemangan pangan dan diversifikasi pangan
2	Kurangnya respon masyarakat
3	Kurangnya kemampuan petugas pengelola
4	Minat kepesertaan lomba masih rendah
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	
1	Kurangnya kesadaran masyarakat
Penyusunan Pola Pangan Harapan	
1	Kurangnya data yang dibutuhkan

No	Pernyataan Risiko
Pengembangan Mekanisasi Pertanian	
1	Kurangnya kemampuan Sumber Daya Petani
2	Kurangnya pemanfaatan kelompok tani/kelembagaan petani
3	Rendahnya kesadaran pemeliharaan alat mesin pertanian
Pengembangan Infrastruktur Bidang Pertanian	
1	Kekurangan air pertanian
2	Masih banyaknya sawah tadah hujan
DAK Pertanian	
1	Kekurangan air pertanian
2	Masih banyaknya sawah tadah hujan
Peningkatan Kapasitas tenaga Penyuluh Pertanian	
1	Kurangnya pelaksanaan Bintek dan Pembekalan bagi Penyuluh Pertanian (PPL)
2	Kurang berkembangnya pengetahuan, kemampuan dan wawasan Penyuluh Pertanian
3	Kurangnya pelayanan Penyuluh Pertanian
Penyusunan Program Penyukuhan Pertanian	
1	Kurangnya partisipasi aktif pelaku usaha dalam menyusun program
Pengembangan BPP Kecamatan	
1	Kurangnya fasilitas pendukung penyelenggaraan operasional BPP
Peningkatan Kemampuan Petani dan Kelembagaan petani	
1	Kurangnya partisipasi aktif dari petani
2	Pengelolaan usaha anggota bersifat individual
Pengembangan Kelembagaan Petani IPDMIP	
1	Terbatasnya jumlah petugas Penyuluh Pertanian yang terampil

No	Pernyataan Risiko
Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	
1	Tidak meratanya pembinaan dan pelatihan pada beberapa KWT dan pelaku agribisnis
2	Kurang berkembangnya pelaku agribisnis
Perlindungan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	
1	Kurang sempitnya kesempatan pengamatan serangan OPT
2	Menurunnya jumlah musuh alami OPT
3	Meningkatnya resistensi OPT
4	Tidak adanya perubahan pola tanam sehingga siklus serangan tidak terputus
5	Perubahan iklim sehingga meningkatkan aktivitas OPT tertentu
Peningkatan Perkebunan Tanaman Tahunan	
1	Terbatasnya lahan pertanian yang memenuhi syarat teknis budidaya tanaman tahunan
2	Terbatasnya bibit unggul bersertifikat
3	Terbatasnya kelompok tani komoditas perkebunan yang aktif
Pengembangan Perkebunan tanaman Semusim dan Rempah	
1	Terbatasnya lahan pertanian yang memenuhi syarat teknis budidaya
2	Terbatasnya bibit unggul bersertifikat
3	Rendahnya daya serap pengetahuan dan teknologi pada petani
Peningkatan Sarana Produksi Perkebunan	
1	Terbatasnya lahan pertanian yang memenuhi syarat teknis budidaya
2	Sebagian besar tanaman cengkeh kurang produktif
3	Rendahnya daya serap pengetahuan dan teknologi pada petani
Peningkatan Kualitas Bahan Baku Komoditas Tembakau	
1	Tingginya harga pupuk khusus tembakau
2	Rendahnya daya serap pengetahuan dan teknologi pada petani

No	Pernyataan Risiko
Pengembangan Pertanian Hortikultura	
1	Mahalnya biaya produksi tanaman hortikultura
2	Kurangnya kemampuan dan pengetahuan petani
Pengembangan Pertanian Tanaman pangan	
1	Kurangnya kemampuan ekonomi
2	Kurangnya kemampuan dan pengetahuan petani
Operasional Balai Benih Pertanian	
1	Kurangnya kemampuan SDM teknis pertanian
2	Kurangnya jumlah SDM teknis pembibitan
Pemutakhiran Data dan Pelayanan Informasi Perencanaan Perangkat Daerah	
1	Kurangnya kesadaran kemanfaatan data dan informasi

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I
:

*Form 3.a : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis
Pemerintah Daerah*

Form 3.b : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD

*Form 3.c : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional
OPD*

4.3. Analisis Risiko

4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi sebagai berikut :

a. Risiko Strategis OPD

No	Level Risiko	Risiko
1	Rendah	Kurangnya data yang tersedia untuk penyusunan Pola Pangan Harapan dan Neraca Bahan Makanan
2	Rendah	Terbatasnya cadangan pangan pemerintah daerah
3	Rendah	Petani tidak memperoleh informasi yang memadai tentang adanya perlindungan bagi usaha taninya melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
4	Sedang	Meningkatnya luasan lahan pertanian yang mengalami kerusakan tanaman
5	Tinggi	Meningkatnya luasan lahan pertanian yang mengalami kekeringan
6	Sedang	Tanaman perkebunan banyak yang sudah tidak produktif
7	Sedang	Rendahnya penguasaan teknik budidaya tanaman pangan
8	Sedang	Kurangnya minat petani terhadap komoditas hortikultura
9	Sedang	Pengetahuan tentang teknik budidaya masih kurang
10	Sedang	Rendahnya pengetahuan pengelolaan usaha agribisnis

b. Risiko Operasional OPD

No	Level Risiko	Risiko
1.	Sangat Tinggi	-
2.	Tinggi	Meningkatnya luasan lahan pertanian yang mengalami kekeringan
3.	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyaknya sawah tadah hujan 2. Kekurangan air pertanian 3. Tidak adanya perubahan pola tanam sehingga siklus serangan hama tidak terputus 4. Perubahan iklim sehingga meningkatkan aktivitas OPT tertentu
4.	Rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertambahnya masyarakat terdampak daerah rawan pangan 2. Kebutuhan masyarakat di lokasi TMMD akan sektor pertanian yang cukup bervariasi 3. Kurangnya respon masyarakat 4. Minat kepesertaan lomba masih rendah 5. Kurang berkebangnya pelaku agrobisnis 6. Rendahnya daya serap pengetahuan dan teknologi pada petani
5.	Sangat Rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tertanganinya masyarakat terdampak daerah rawan pangan 2. Kurangnya kemampuan produktif sumber daya manusia 3. Kurang optimalnya kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan Lembaga distribusi pangan masyarakat 4. Terbatasnya gudangan cadangan pangan pemerintah 5. Kurangnya sarana prasarana pengembangan dan diversifikasi pangan

No	Level Risiko	Risiko
		<p>6. Kurangnya kemampuan petugas pengelola</p> <p>7. Belum tersusunnya Pola Pangan Harapan dan Neraca Bahan Makanan</p> <p>8. Kurangnya kesadaran masyarakat akan mutu dan keamanan pangan</p> <p>9. Kurangnya kemampuan sumber daya manusia petani dalam mekanisasi pertanian</p> <p>10. Kurangnya pemanfaatan kelompok tani/kelembagaan petani</p> <p>11. Rendahnya kesadaran pemeliharaan alsintan</p> <p>12. Kurangnya air pertanian</p> <p>13. Kurangnya pelaksanaan bintek dan pembekalan teknis bagi PPL</p> <p>14. Kurang berkembangnya pengetahuan, kemampuan dan wawasan PPL</p> <p>15. Kurangnya pelayanan PPL</p> <p>16. Kurangnya partisipasi aktif pelaku usaha dalam menyusun program</p> <p>17. Kurangnya fasilitas pendukung penyelenggaraan operasional BPP</p> <p>18. Kurangnya partisipasi aktif petani dalam kelembagaan petani</p> <p>19. Pengelolaan usaha anggota bersifat individual</p> <p>20. Terbatasnya jumlah petugas penyuluh pertanian yang terampil</p> <p>21. Tidak meratanya pembinaan dan pelatihan pada beberapa KWT pelaku agribisnis</p> <p>22. Kurangnya kesempatan pengamatan serangan OPT</p>

No	Level Risiko	Risiko
		23. Menurunnya jumlah musuh alami OPT 24. Meningkatnya resistensi OPT 25. Terbatasnya lahan pertanian yang memenuhi syarat teknis budidaya tanaman perkebunan 26. Terbatasnya bibit unggul bersertifikat 27. Rendahnya daya serap pengetahuan dan teknologi pada petani 28. Sebagian besar tanaman cengkeh kurang produktif 29. Tingginya harga pupuk khusus tembakau 30. Mahalnya biaya produksi tanaman hortikultura 31. Kurangnya kemampuan pengetahuan petani tentang budidaya tanaman hortikultura 32. Kurangnya kemampuan ekonomi petani tanaman pangan 33. Kurangnya kemampuan pengetahuan petani tentang budidaya tanaman pangan 34. Kurangnya kemampuan SDM teknis pertanian pada UPT Balai Benih Pertanian 35. Kurangnya jumlah SDM teknis perbenihan pada UPT Balai Benih Pertanian 36. Kurangnya kesadaran kemanfaatan data dan informasi Perencanaan.

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 4 : Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko*.

4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level "Sangat

Tinggi”, “Tinggi” dan “Sedang”. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas*.

4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika :

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran :

Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)

- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g – i)*.

4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian

mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8 (kolom a – f)*.

(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a – e)*.

(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi :

- a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan infrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian
Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam

kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;
2. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Evaluasi SPIP;
2. Reviu dan pendampingan penyusunan RTP;
3. Monev dan paparan hasil pengawasan secara rutin;
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
5. Penyusunan Peta Kompetensi.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu di pada Tahun 2021 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, *Form 6 dan 7*.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a – f)*. Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2021 ketika akan merealisasikan RTP.

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k)*.

Pemantauan dilakukan pada bulan Februari – Maret Tahun 2022.

Laporan tersebut disampaikan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas paling lambat bulan April Tahun 2022.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Banyumas,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Banyumas government. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS" at the top and "BANYUMAS" at the bottom, with a star on the left side. Inside the ring, the text "DINPERTAN KP" is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Ir. JAKA BUDI SANTOSA, MM
NIP. 19650606 199403 1 008

LAMPIRAN

**REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)**

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)													KESIMPULAN KUOSIONER CEE	
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13		Modus
A PENEKAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA															Kurang Memadai	
1	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	Memadai
2	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	2	3	3	3	2	3	2	2	2	3	4	3	2	2	Kurang Memadai
3	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	2	4	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	Memadai
4	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI															Memadai	
1	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	3	2	3	2	3	2	3	1	2	1	3	3	3	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	1	3	3	3	Memadai
3	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	2	3	3	3	2	3	2	3	2	2	3	3	2	3	Memadai
4	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
C KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF															Kurang Memadai	
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3	3	Memadai
2	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	2	2	3	3	2	3	3	3	2	3	4	3	3	3	Memadai
3	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	2	3	3	3	2	3	3	3	2	2	1	3	3	3	Memadai

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)														KESIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	Modus	
4	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan kedalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	3	3	3	3	2	3	3	3	1	4	1	3	3	3	Memadai
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	3	3	2	2	3	3	3	3	4	4	3	3	3	Memadai
6	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	2	2	3	2	1	3	3	2	1	3	4	3	2	2	Kurang Memadai
7	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	Memadai
8	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggalai pelaporan risiko/masalah	2	2	3	2	2	3	3	3	2	3	4	3	3	3	Memadai
D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN															Kurang Memadai	
1	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	3	2	2	2	2	3	3	2	2	3	1	3	2	2	Kurang Memadai
2	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	2	3	3	3	2	3	3	4	3	3	4	3	3	3	Memadai
3	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3	4	3	3	3	Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	2	3	3	3	2	3	3	3	2	2	4	3	3	3	Memadai
E PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT															Kurang Memadai	
1	Kewenangan direviu secara periodik	3	2	3	2	2	3	2	3	2	2	1	3	2	2	Kurang Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	4	3	2	3	Memadai
3	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
F PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA															Kurang Memadai	
1	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	1	2	3	2	Kurang Memadai
2	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	2	2	3	3	2	3	3	4	4	3	1	3	3	3	Memadai

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)														KESIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	Modus	
3	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	2	2	3	2	2	3	2	3	2	2	3	3	2	2	Kurang Memadai
4	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	2	3	2	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	Memadai
5	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	1	3	2	3	Memadai
6	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	2	3	2	2	3	3	3	2	3	1	3	3	3	Memadai
7	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	3	3	3	2	3	2	3	2	3	4	3	2	3	Memadai
G	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF															Memadai
1	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	Memadai
2	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	Memadai
4	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	2	3	1	3	3	3	2	3	2	3	4	1	3	3	Memadai
5	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT															Memadai
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	1	4	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	Memadai

**SIMPULAN SURVEI PERSEPSI ATAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS**

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	-	-	Kurang Memadai	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	-	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	-	Hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai dasar pemberian reward dan punishment untuk implementasi pengukuran kinerja	Memadai	-	memadai	Hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai dasar pemberian reward dan punishment untuk implementasi pengukuran kinerja
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	-	-	Kurang Memadai	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	Kurang Memadai	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	-	-	Kurang Memadai	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	-	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	-	-	Kurang Memadai	Kewenangan direviu secara periodik	Kurang Memadai	Kewenangan direviu secara periodik
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	Kurang Memadai	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja) - OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai	Kurang Memadai	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja) - OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM
7	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF	-	-	Memadai		-	
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	-	-	Memadai		-	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2022
Periode Yang dinilai	: RPJMD Perubahan 2018-2023
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar : Urusan Pemerintahan Pilihan
OPD yang Dinilai	: DINPERTAN KP
Sumber Data	: Renstra Perubahan 2018-2023
Tujuan Strategis	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama Meningkatnya Akses Pangan Meningkatnya Pemanfaatan Pangan Meningkatnya Produksi Tanaman Pertanian
Sasaran Strategis	Meningkatnya Keamanan Pangan Meningkatnya Diversifikasi Pangan Meningkatnya Penguatan Cadangan Pangan Meningkatnya Penanganan Daerah rawan Pangan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Pertanian Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pendukung Produksi Pertanian Meningkatnya Hasil Penanganan Bencana Pertanian
Indikator Kinerja Sasaran Renstra OPD	IKU 1 Persentase peningkatan ketersediaan sarana pendukung produksi pertanian : 50 % 2 Persentase peningkatan jumlah sampel pangan yang diuji dalam rangka keamanan pangan : 5 % 3 Persentase Penguatan Cadangan Pangan : 84 % 4 Persentase Penanganan daerah rawan pangan : 66 % 5 Persentase peningkatan komoditas pangan lokal yang dikembangkan : 25 % 6 Persentase peningkatan ketersediaan prasarana pendukung produksi pertanian : 50 % 7 Persentase peningkatan kelas kelompok : 6 % 8 Persentase peningkatan penanganan bencana pertanian : 1 %
Informasi Lain	-
	Tujuan 1: Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama Sasaran 1.1: Meningkatnya Penguatan Cadangan Pangan Ind Sasaran 1.1.1: Persentase Penguatan Cadangan Pangan Program 1.1.1.1: PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Tujuan 2: Meningkatnya Akses Pangan Sasaran 2.1: Meningkatnya Penanganan Daerah rawan Pangan Ind Sasaran 2.1.1: Persentase Penanganan daerah rawan pangan Program 2.1.1.1: PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Tujuan 3: Meningkatnya Pemanfaatan Pangan Sasaran 3.1: Meningkatnya Keamanan Pangan

Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko

<u>Ind Sasaran 3.1.1:</u> Persentase peningkatan jumlah sampel pangan yang diuji dalam rangka keamanan pangan
<u>Program 3.1.1.1:</u> PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
<u>Sasaran 3.2:</u> Meningkatnya Diversifikasi Pangan
<u>Ind Sasaran 3.2.1:</u> Persentase peningkatan komoditas pangan lokal yang dikembangkan
<u>Program 3.2.1.1:</u> PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
<u>Tujuan 4:</u> Meningkatnya Produksi Tanaman Pertanian
<u>Sasaran 4.1:</u> Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Pertanian
<u>Ind Sasaran 4.1.1:</u> Persentase peningkatan ketersediaan sarana pendukung produksi pertanian
<u>Program 4.1.1.1:</u> PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
<u>Ind Sasaran 4.1.2:</u> Persentase peningkatan ketersediaan prasarana pendukung produksi pertanian
<u>Program 4.1.2.1:</u> PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
<u>Sasaran 4.2:</u> Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pendukung Produksi Pertanian
<u>Ind Sasaran 4.2.1:</u> Persentase peningkatan kelas kelompok
<u>Program 4.2.1.1:</u> PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
<u>Sasaran 4.3:</u> Meningkatnya Hasil Penanganan Bencana Pertanian
<u>Ind Sasaran 4.3.1:</u> Persentase peningkatan penanganan bencana pertanian
<u>Program 4.3.1.1:</u> PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Purwokerto, 10 Agustus 2022
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

Ir. JAKA BUDI SANTOSA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650606 199403 1 008

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2022
Periode Yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018-2023
Urusan Pemerintahan	: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	: URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	: NON URUSAN
OPD yang Dinilai	: DINPERTAN KP
Sumber Data	: RENSTRA
Tujuan Strategis	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama
	Meningkatnya Akses Pangan
	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan
	Meningkatnya Produksi Tanaman Pertanian
Program OPD (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
	a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
	a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
	b. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
	3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
	a. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
	4. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
	a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
	5. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
	b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
	6. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
	a. Pembangunan Prasarana Pertanian
	7. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
	a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
	8. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
	9. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Keluaran/Hasil Kegiatan	Jumlah kelompok yang naik kelas Target: 101 Kelompok	
	Jumlah kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan Target: 1 Keg	
	Jumlah kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian yang dilaksanakan Target: 3 Keg	
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun Target: 3 Dokumen	
	Jumlah administrasi umum yang dikelola Target: 6 Jenis	
	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola Target: 2 Jenis	
	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan Target: 3 Jenis	
	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Target: 2 Jenis	
	Jumlah lokasi kemandirian pangan yang difasilitasi Target: 5 Lokasi	
	Jumlah desa rawan pangan yang ditangani Target: 74 Desa	
	Jumlah sampel bahan makanan hasil survey yang diuji Target: 100 sampel	
	Jumlah pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan yang dilaksanakan Target: 2 Keg	
	Jumlah kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang dilaksanakan Target: 3 Keg	
	Jumlah barang milik daerah yang tersedia Target: 2 Jenis	
	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten yang dilaksanakan Target: 2 Keg	
Jumlah jenis pembangunan Infrastruktur di bidang pertanian yang dilaksanakan Target: 4 Jenis		
Informasi Lain	-	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian	Kegiatan	Indikator
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi kemandirian pangan yang difasilitasi Target: 5 Lokasi
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang dilaksanakan Target: 3 Keg
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan yang dilaksanakan Target: 2 Keg
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa rawan pangan yang ditangani Target: 74 Desa
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel bahan makanan hasil survey yang diuji Target: 100 sampel
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian yang dilaksanakan Target: 3 Keg
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan Target: 1 Keg
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah jenis pembangunan Infrastruktur di bidang pertanian yang dilaksanakan Target: 4 Jenis
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten yang dilaksanakan Target: 2 Keg
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok yang naik kelas Target: 101 Kelompok
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun Target: 3 Dokumen

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola Target: 2 Jenis
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola Target: 6 Jenis
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia Target: 2 Jenis
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia Target: 2 Jenis
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan Target: 3 Jenis

Purwokerto, 10 Agustus 2022

KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

Ir. JAKA BUDI SANTOSA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650606 199403 1 008

No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik											
	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel											
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Perumusan cascading dan indikator kinerja belum berpedoman pada proses bisnis organisasi	501	Kepala Daerah	Kurangnya kualitas SDM yang menangani perencanaan	Internal	C	Nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja tidak optimal	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait	BAPPEDA LITBANG
				Belum optimalnya tingkat pemahaman OPD tentang peta proses bisnis			Internal	C	Target kinerja yang ditetapkan tidak tercapai optimal	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait	BAPPEDA LITBANG	
				Kinerja Individu ASN belum selaras dengan tujuan OPD dan kurang mendukung pencapaian kinerja Pemkab sehingga nilai SAKIP pada komponen pengukuran kinerja individu tidak optimal	503	Kepala Daerah	ASN belum memahami tujuan OPD	Internal	C	Nilai SAKIP pada komponen pengukuran kinerja tidak optimal	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	BKPSDM
				Pelaporan kinerja belum optimal menggambarkan capaian kinerja organisasi secara utuh	401	Kepala Daerah	SDM Penyusun laporan kurang memahami sepenuhnya ketentuan penyusunan laporan kinerja	Internal	C	Nilai SAKIP pada komponen pelaporan kinerja tidak optimal	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait	SETDA
				Kurangnya respon dan komitmen organisasi dalam menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja	601	Kepala Daerah	Kurangnya pemahaman OPD mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan	Internal	C	Nilai SAKIP pada komponen evaluasi internal tidak optimal	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait	INSPEKTORAT
							Kurangnya koordinasi OPD dengan evaluator (APIP) terkait tindak lanjut evaluasi akuntabilitas kinerja	Internal	C	Nilai SAKIP pada komponen evaluasi internal tidak optimal	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait	INSPEKTORAT
							Belum tertib dan dikelola dengan baiknya pengarsipan dokumen pendukung	Internal	C	Kinerja kurang akuntabel karena dokumen pendukung tidak tersedia pada saat dibutuhkan	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait	INSPEKTORAT
				Penetapan target kinerja yang tidak tepat	501	Kepala Daerah	Kurangnya koordinasi antara OPD dengan Tim Penyusun RPJMD	Internal	C	Nilai SAKIP pada komponen capaian kinerja tidak optimal	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait	BAPPEDA LITBANG
				Kualitas evaluasi program belum mampu memperbaiki kualitas pelaksanaan maupun hasil program	501	Kepala Daerah	Metode evaluasi program belum tepat	Internal	C	Nilai SAKIP pada komponen evaluasi internal tidak optimal	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait	BAPPEDA LITBANG
				Penetapan klasifikasi anggaran belum sesuai ketentuan	502	Kepala Daerah	Kurang optimalnya verifikasi dan reviu rencana anggaran	Internal	C	Tidak tercapainya status WTP terhadap laporan keuangan daerah	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	BKAD
				Belum optimal dan akuntabelnya pengelolaan aset daerah	502	Kepala Daerah	Keterbatasan anggaran untuk menginventarisir seluruh aset daerah	Internal	C	Tidak tercapainya status WTP terhadap laporan keuangan daerah	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	BKAD
							Kurangnya kompetensi dan jumlah SDM pengurus barang OPD	Internal	C	Tidak tercapainya status WTP terhadap laporan keuangan daerah	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	BKAD
			Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	Kelemahan pengelolaan pendapatan daerah karena rentang kendali luasnya wilayah Wajib Pajak		Kepala Daerah	Otorisasi atas transaksi pendapatan belum dilaksanakan secara optimal	Internal	C	Tidak tercapainya status WTP terhadap laporan keuangan daerah	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	BAPENDA

		À Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	Pelayanan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan standar pelayanan	212	Kepala Daerah	Keterbatasan anggaran, sarana prasarana dan SDM	Eksterna I	C	Kepuasan Pengguna Layanan rendah	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	DINDUKCAPIL
			SOP kurang berkualitas				Eksterna I	C	Tidak tercapainya nilai persepsi terhadap kualitas pelayanan publik sesuai target	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	DINDUKCAPIL
			Terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh perangkat desa dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah desa	213	Kepala Daerah	SDM Pemerintahan Desa kurang kompeten Kebijakan dan prosedur yang tidak jelas			Tidak tercapainya nilai persepsi terhadap kualitas pelayanan publik sesuai target	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	DINSOSPERMASDES
			Penerbitan rekomendasi teknis melebihi waktu yang ditetapkan SOP	218	Kepala Daerah	Kurangnya tenaga ahli untuk melakukan survei/kajian pemberian rekomendasi teknis			Pelayanan pada masyarakat kurang optimal	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	DPMPTSP
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat											
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat											
		Rata-rata Lama Sekolah	Adanya anak Tidak sekolah karena sama sekali tidak sekolah, Putus Sekolah dan tidak melanjutkan	101	Kepala Daerah	Biaya sekolah swasta tinggi dan transportasi mahal atau tidak terjangkau transportasi yang murah	Internal	C	Banyak anak putus sekolah	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	DINDIK
			Kurangnya kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak	101	Kepala Daerah	Tingkat pendidikan orang tua yang masih rendah	Internal	C	Rendahnya angka melanjutkan sekolah	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	DINDIK
			Bekurangnya minat anak untuk membaca dan belajar	223	Kepala Daerah	Kurang optimalnya fasilitas perpustakaan dengan memanfaatkan teknologi untuk mendukung minat baca dan belajar	Internal	C	berkurangnya pengunjung perpustakaan	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	DINARPUSDA
			Kurang Optimalnya Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dalam memberikan pelayanan pendidikan	101	Kepala Daerah	Kurangnya Sosialisasi dan Belum Optimalnya Mutu Pendidikan Non FormalProgram Kesetaraan Paket A dan Paket B	Internal	C	Berkurangnya nilai APM SD dan SMP	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	DINDIK
		Harapan Lama Sekolah	Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar kurang merata	101	Kepala Daerah	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang kurang tepat	Internal	C	Kuantitas dan Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan byang didistribusikan elum memenuhi kebutuhan sekolah	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	DINDIK
			Kurangnya Guru yang berstatus sebagai PNS dan masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru Non ASN				Internal	C	Proses pembelajaran di sekolah formal maupun non formal belum optimal	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	DINDIK
			Kurangnya peningkatan kompetensi guru				Internal	C	Proses pembelajaran di sekolah formal maupun non formal belum optimal	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	DINDIK
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang kurang tepat				Internal	C	Ketersediaan Pendidik dan Tenaga pendidikan belum merata memenuhi kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	DINDIK

			Kurang meratanya sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama negeri	101	Kepala Daerah	Keterbatasan anggaran	Internal	C	Angka Harapan Lama Sekolah tidak tercapai	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	DINDIK
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat											
		Usia Harapan Hidup (UHH)	Pelayanan kesehatan ketika adanya pandemi penyakit belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat	102	Kepala Daerah	Kurangnya Jumlah Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan ketika adanya pandemi penyakit	Internal	C	Meningkatnya kematian ibu, bayi dan balita	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	DINKES
						Belum optimalnya penanganan Angka Kematian Ibu (AKI) ketika adanya pandemi penyakit	Internal	C	Meningkatnya kematian ibu, bayi dan balita	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	DINKES
						Adanya bencana alam maupun non alam yang menyebabkan kematian	Eksternal	UC	Meningkatnya kematian ibu, bayi dan balita	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	DINKES
			Masih ada masyarakat yang membuang limbah sembarangan	102	Kepala Daerah	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengolahan limbah	Internal	C	Lingkungan tidak sehat	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	DINKES
			Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap upaya kesehatan masyarakat dan perorangan	102	Kepala Daerah	Kurangnya efektifnya Sosialisasi kepada masyarakat terkait Pola Hidup Sehat	Internal	C	Banyaknya masyarakat di usia produktif yang menderita sakit kronis dan akut	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	DINKES
Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk											
		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Kegagalan program keluarga berencana	214	Kepala Daerah	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KB	Internal	C	Laju pertumbuhan laju penduduk tidak terkendali	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	DPPKBP3A
						Kurangnya sosialisasi dari Penyuluh KB	Internal	C	Laju pertumbuhan laju penduduk tidak terkendali	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	DPPKBP3A
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak											
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Masih kurangnya perempuan dalam mengakses, mengontrol, berpartisipasi dan memperoleh manfaat dalam pelayanan kesehatan, pendidikan dan ekonomi	208	Kepala Daerah	Masih adanya persepsi masyarakat yang kurang terkait keterbatasan peran perempuan dalam pendidikan, kesehatan dan kegiatan ekonomi	Internal	C	Indek Pembangunan Gender tidak tercapai sesuai target	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	DPPKBP3A
		Nilai Kabupaten Layak Anak	Belum terpenuhinya penguatan kelembagaan dalam rangka pemenuhan hak anak	208	Kepala Daerah	Kurangnya sumber daya manusia (SDM) terlatih Konvensi Hak Anak dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan	Internal	C	Nilai Kabupaten Layak Anak tidak tercapai sesuai target	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	DPPKBP3A
						Kurangnya anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	Internal	C	Nilai Kabupaten Layak Anak tidak tercapai sesuai target	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	DPPKBP3A

			Tidak terpenuhinya Klaster Hak Anak	208	Kepala Daerah	Tidak terpenuhinya hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus.	Internal	C	Nilai Kabupaten Layak Anak tidak tercapai sesuai target	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	DPPKBP3A
Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan											
Meningkatnya perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin											
		Persentase Lingkungan Permukiman yang layak huni	Bertambahnya pemukiman tidak layak huni	104	Kepala Daerah	Penduduk miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah layak huni	Internal	C	Penduduk miskin tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	DINPERKIM
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Belum semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terpenuhi kebutuhan dasarnya	106	Kepala Daerah	SDM yang melakukan pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) kurang cermat	Internal	C	Terdapat target PPKS yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya	1.Kepala Daerah 2.OPD terkait 3.Masyarakat	DINSOSPERMASDES
		Persentase penanganan korban bencana	Masih adanya korban bencana yang belum tertangani kebutuhan dasarnya	106	Kepala Daerah	Penanganan korban bencana tidak tepat sasaran	Internal	C	Penanganan korban bencana tidak tepat sasaran	1. Kepala Daerah 2.A Masyarakat 3. OPD Terkait	DINSOSPERMASDES
			SDM Pendata korban bencana kurang cermat			Internal	C	Penanganan korban bencana tidak tepat sasaran	1. Kepala Daerah 2.A Masyarakat 3. OPD Terkait	DINSOSPERMASDES	
			Kurangnya ketersediaan anggaran penanganan korban bencana			Internal	C	Target penangan korban bencana tidak tercapai	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait	DINSOSPERMASDES	
			Ketersediaan bantuan rumah layak huni bagi korban bencana belum tercukupi	104	Kepala Daerah	Kurangnya ketersediaan anggaran bantuan rumah layak huni bagi korban bencana	Internal	C	Tidak terpenuhinya SPM Perumahan	1. Kepala Daerah 2.A Masyarakat 3. OPD Terkait	DINPERKIM
			Masih kurangnya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	213	Kepala Daerah	kurangnya kapasitas SDM masyarakat dalam penanganan pencegahan bencana	Internal	C	Target penangan korban bencana tidak tercapai	1. Kepala Daerah 2.A Masyarakat 3. OPD Terkait	DINSOSPERMASDES
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian											
Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan dan perdagangan											
		Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Kurangnya daya saing Industri kecil	331	Kepala Daerah	Industri kecil belum memanfaatkan teknologi industri yang efisien	Internal	C	Harga produk industri kecil tidak bersaing karena biaya produksi tinggi	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait	DINPERINDAG

		Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	Kurang berkembangnya sektor perdagangan	330	Kepala Daerah	Tidak ada stimulus bagi industri perdagangan	Internal	C	Peningkatan jumlah usaha pada sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor tidak signifikan	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait	DINPERINDAG	
Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani												
		Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pertanian Kehutanan dan Perikanan	Hasil pertanian, peternakan dan perikanan kurang berdaya bersaing	209	Kepala Daerah	Masih tingginya biaya produksi sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan lokal	Internal	C	Peningkatan Pendapatan sektor sektor pertanian Kehutanan dan Perikanan tidak signifikan	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait	DINPERTAN KP	
						Kurangnya penerapan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, peternakan dan perikanan	Internal	C	hasil pertanian, peternakan dan perikanan belum memberikan keuntungan yang tinggi bagi petani	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait	DINPERTAN KP	
						Masih kurangnya kompetensi SDM Pertanian dan Perikanan dalam meningkatkan daya saing produk Pertanian dan Perikanan	Internal	C	Hasil Produk Pertanian dan Perikanan belum memberikan keuntungan yang tinggi bagi petani	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait	DINPERTAN KP	
Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis												
Meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agrobisnis untuk ketersediaan pangan utama												
		Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Peredaran produk pertanian yang kurang aman pangan	327	Kepala Daerah	Kurang intensifnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan produk pertanian	Internal	C	kurang amannya produk pertanian	1. Pemerintah 2. OPD 3. Petani 4. Masyarakat	DINPERTAN KP	
						Belum meratanya jenis dan uji sampel keamanan pangan produk pertanian	Internal	C	kurang amannya produk pertanian	1. Pemerintah 2. OPD 3. Petani 4. Masyarakat	DINPERTAN KP	
				Menurunnya produksi tanaman pangan untuk memenuhi ketersediaan pangan karena semakin menurunnya luas lahan pertanian	327	Kepala Daerah	Beralihnya lahan pertanian menjadi perumahan karena tidak ditaatinya aturan tentang tata ruang	Internal	C	Produksi pangan menurun	1. Pemerintah 2. OPD 3. Petani 4. Masyarakat	DINPERTAN KP
							Menurunnya produktivitas lahan pertanian	Internal	C	Produksi pangan menurun	1. Pemerintah Daerah 2. OPD 3. Petani 4. Masyarakat	DINPERTAN KP
				Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan Utama tidak seluruhnya untuk memenuhi ketersediaan Pangan Utama Daerah	327	Kepala Daerah	Sarana prasarana untuk mendukung ketersediaan cadangan pangan belum dimanfaatkan secara optimal	Internal	C	Kebutuhan pangan utama tidak tercukupi secara mandiri oleh Pemerintah Daerah	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat	DINPERTAN KP
						Cadangan pangan pemerintah belum memadai	Internal	UC	Kebutuhan pangan utama tidak tercukupi secara mandiri oleh Pemerintah Daerah	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat	DINPERTAN KP	

		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW	103	Kepala Daerah	Keterbatasan RTRW sebagai perangkat perijinan	Internal	C	Rendahnya investasi daerah	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait	DINPERKIM	
Meningkatnya penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim												
		Indeks Resiko Bencana	Bencana yang tidak tertanggulangi dengan baik	105	Kepala Daerah	Kurangnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Internal	C	Kurangnya kesiapan daerah dalam penanggulangan bencana	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait	BPBD	
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat												
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata dan memadai												
		Persentase Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Menurunnya tingkat kemantapan jalan	103	Kepala Daerah	Ketergantungan terhadap anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan dan peningkatan jalan	Internal	C	Menurunnya kinerja pembangunan infrastruktur jalan	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait	DPU	
			Kurang tepatnya metode dan waktu pelaksanaan pembangunan				Internal	C	Menurunnya kinerja pembangunan infrastruktur jalan	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait	DPU	
			Menurunnya layanan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	103	Kepala Daerah	Pemeliharaan jaringan kurang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat	Internal	C	Menurunnya produktivitas hasil petani	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait	DPU	
							Internal	C	Tidak terpenuhinya kebutuhan air irigasi untuk pertanian	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait	DPU	
							Internal	C	Terjadinya konflik penggunaan air irigasi	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait	DPU	
				Adanya penduduk yang belum terlayani air minum layak	104	Kepala Daerah	Kurangnya ketersediaan sumber air baku	Eksternal	UC	Tidak terpenuhinya layanan dasar air minum	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait	DINPERKIM
							Eksternal	UC	Bertambahnya beban masyarakat dalam penyediaan air minum	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait	DINPERKIM	
				Adanya penduduk yang belum terlayani infrastruktur air limbah	104	Kepala Daerah	Keterbatasan lahan untuk pembangunan infrastruktur air limbah	Internal	C	Tidak terpenuhinya layanan dasar air limbah	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait	DINPERKIM
						Eksternal	C	Pemanfaatan infrastruktur air limbah yang tersedia belum optimal	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait	DINPERKIM		

		Persentase Kinerja Infrastruktur Perhubungan	Kurang terkoneksi sistem transportasi	215	Kepala Daerah	Kurangnya terminal Tipe C	Internal	C	Kurangnya keamanan dan kenyamanan pelayanan transportasi	1. Kepala Daerah 2.A Masyarakat 3. OPD Terkait	DINHUB
						Belum terpenuhinya standar pelayanan pada terminal yang ada	Internal	C	Kurangnya optimalnya pelayanan transportasi	1. Kepala Daerah 2.A Masyarakat 3. OPD Terkait	DINHUB
	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif										
	Meningkatnya Industri Pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal										
		Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata	Menurunnya jumlah kunjungan wisata	326	Kepala Daerah	Kurang menariknya destinasi wisata dan paket wisata yang tersedia	Internal	C	Target kunjungan wisata tidak tercapai	1. Kepala Daerah 2.A Masyarakat 3. OPD Terkait	DINPORABUDPAR
						Belum tersedianya paket wisata yang menghubungkan antar destinasi dan berorientasi aktivitas	Internal	C	Rata-rata lama tinggal wisatawan rendah	1. Kepala Daerah 2.A Masyarakat 3. OPD Terkait	DINPORABUDPAR
		Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	Kurang berkembangnya pelaku ekonomi kreatif	326	Kepala Daerah	Kurangnya peran komunitas dalam pengembangan ekonomi kreatif	Internal	C	Pelaku ekonomi kreatif tidak berkembang	1. Kepala Daerah 2.A Masyarakat 3. OPD Terkait	DINPORABUDPAR
						Kurangnya fasilitasi pemerintah terhadap pelaku ekonomi kreatif	Internal	C	pelaku ekonomi kreatif tidak berkembang	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait	DINPORABUDPAR
						Belum adanya data yang update pelaku ekonomi kreatif yang akan difasilitasi untuk dikembangkan	Internal	C	Pelaku ekonomi kreatif tidak berkembang	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait	DINPORABUDPAR
	Meningkatnya pertumbuhan pelaku ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro										
		Persentase Koperasi Sehat	Kurangnya kemampuan pengurus koperasi untuk mengelola koperasi menjadi sehat	217	Kepala Daerah	Kurangnya pembinaan terhadap koperasi	Eksternal	C	Koperasi tidak sehat	1. Kepala Daerah 2.A Masyarakat 3. OPD Terkait	DINAKERKOP UKM
		Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	Kurangnya daya saing usaha mikro	217	Kepala Daerah	Kurangnya peran pemerintah dalam memfasilitasi usaha mikro	Internal	C	Usaha mikro tidak berkembang	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait	DINAKERKOP UKM
						Kurangnya kompetensi SDM dalam mengembangkan usaha mikro	Internal	C	Usaha mikro tidak berkembang	1. Kepala Daerah 2.A Masyarakat 3. OPD Terkait	DINAKERKOP UKM
						Kurangnya inovasi dan penerapan teknologi informasi dalam mengembangkan usaha mikro	Internal	C	Usaha mikro tidak berdaya saing	1. Kepala Daerah 2.A Masyarakat 3. OPD Terkait	DINAKERKOP UKM

						Belum adanya data yang update pelaku usaha mikro yang akan difasilitasi untuk dikembangkan	Internal	C	Usaha mikro tidak berkembang	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait	DINAKERKOP UKM
Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat											
Meningkatnya kerukunan dan peran masyarakat dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara serta menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram											
		Persentase kriminalitas yang tertangani	Meningkatnya kasus gangguan keamanan dan ketertiban	105	Kepala Daerah	Kurangnya pengawasan dan patroli rutin di beberapa lokasi yang rawan gangguan keamanan dan ketertiban	Internal	C	Munculnya kasus gangguan kemanan dan ketertiban	1. Kepala Daerah 2.A Masyarakat 3. OPD Terkait	SATPOL PP
						Kertebatasan personil lapangan yang menjaga keamanan dan ketertiban	Internal	C	Gangguan keamanan dan ketertiban tidak tertangani	1 Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD terkait	SATPOL PP
Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah											
		Persentase Pelestarian Budaya Banyumas	Masyarakat kurang minat dan tidak mengenal Budaya Banyumas	222	Kepala Daerah	Berkurangnya even yang menampilkan karya budaya dan kesenian Banyumas	Internal	C	Budaya Banyumas kurang lestari	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait	DINPORABUDPAR
						Kurangnya revitalisasi dan pelestarian karya budaya Banyumas	Internal	C	Budaya Banyumas dimungkinkan punah	1. Kepala Daerah 2.A Masyarakat 3. OPD Terkait	DINPORABUDPAR
Meningkatnya peran dan daya saing pemuda											
		Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	Penurunan prestasi dan daya saing pelajar dan pemuda	219	Kepala Daerah	Menurunnya kejuaraan yang diikuti oleh pelajar dan pemuda	Internal	C	Menurunnya motivasi pelajar dan pemuda untuk meningkatkan kualitasnya	1. Kepala Daerah 2.A Masyarakat 3. OPD Terkait	DINPORABUDPAR
						Kurangnya fasilitasi pemerintah dalam bidang kepemudaan dan olahraga	Internal	C	Tidak berkembangnya potensi kepemudaan dan olahraga	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait	DINPORABUDPAR
						Berkurangnya pembinaan SDM kepemudaan dan olahraga yang berkualitas	Internal	C	Menurunnya kualitas SDM kepemudaan dan olahraga	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait	DINPORABUDPAR

IDENTIFIKASI RESIKO STRATEGIS OPD

NO	Tujuan	NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
						Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama	1	Meningkatnya Penguatan Cadangan Pangan	1	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tidak memadai	209	Dinpertan KP	Terbatasnya sarana dan prasarana serta pengelolaan gudang cadangan pangan pemerintah	Internal	C	Ketersediaan pangan utama kurang optimal	Masyarakat	DINPERTAN KP
2	Meningkatnya Akses Pangan	2	Meningkatnya Penanganan Daerah rawan Pangan	2	Persentase Penanganan daerah rawan pangan	Tidak tertanganinya daerah rawan pangan	209	Dinpertan KP	Kurangnya koordinasi lintas sektoral dalam penanganan daerah rawan pangan	Eksternal	UC	Jumlah desa rawan pangan meningkat	Masyarakat	DINPERTAN KP
3	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	3	Meningkatnya Keamanan Pangan	3	Persentase peningkatan jumlah sampel pangan yang diuji dalam rangka keamanan	Jumlah sampel pangan untuk uji keamanan pangan menurun	209	Dinpertan KP	Keterbatasan sarana prasarana pengujian sampel pangan	Internal	C	Pengujian sampel terbatas	Masyarakat	DINPERTAN KP
		4	Meningkatnya Diversifikasi Pangan	4	Persentase peningkatan komoditas pangan lokal yang dikembangkan	penurunan jenis komoditas pangan lokal yang dikembangkan	209	Dinpertan KP	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penganeekaragaman pangan lokal	Internal	C	Ketergantungan terhadap pangan utama	Masyarakat	DINPERTAN KP
4	Meningkatnya Produksi Tanaman Pertanian	5	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Pertanian	5	Persentase peningkatan ketersediaan sarana pendukung produksi pertanian	Kurang optimalnya ketersediaan sarana pendukung produksi pertanian	327	Dinpertan KP	Tidak tersedianya data kebutuhan sarana pendukung produksi pertanian	Eksternal	C	Produksi pertanian tidak optimal	Masyarakat (Petani)	DINPERTAN KP
				6	Persentase peningkatan ketersediaan prasarana pendukung produksi pertanian	Penurunan ketersediaan prasarana pendukung produksi pertanian	327	Dinpertan KP	Akses modal yang terbatas	Eksternal	C	Produksi pertanian menurun	Masyarakat (Petani)	DINPERTAN KP
		6	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pendukung Produksi Pertanian	7	Persentase peningkatan kelas kelompok	Kurang optimalnya pendampingan penyuluh pertanian terhadap kelompok tani	327	Dinpertan KP	SDM Penyuluh Pertanian yang terbatas	Internal	C	Akses wawasan/ pengetahuan kelompok petani terbatas	Kelompok Tani	DINPERTAN KP
		7	Meningkatnya Hasil Penanganan Bencana Pertanian	8	Persentase peningkatan penanganan bencana pertanian	Kurang tertanganinya bencana pertanian	327	Dinpertan KP	Terlambat dalam identifikasi sumber hama penyakit	Internal	C	Terjadi puso (gagal panen)	Masyarakat (Petani)	DINPERTAN KP

Program	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN											
Ind Program			Persentase peningkatan jumlah desa rawan pangan yang ditangani									
Kegiatan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan			Jumlah desa rawan pangan yang ditangani	tidak tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan pangan (Food Security and Vulnerability Atlas "FSVA)	209	Dinpartan KP	tidak tersedia data desa rawan pangan	Internal	C	tidak tertanganinya desa rawan pangan	Masyarakat rawan pangan	DINPERTAN KP
				tidak tersedia, terkelola dan tersalurkannya pangan untuk desa rawan pangan	209	Dinpartan KP	tidak adanya pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan untuk penanganan kerawanan	Eksternal	C	tidak tertanganinya desa rawan pangan	masyarakat rawan pangan	DINPERTAN KP
Tujuan	Meningkatnya Pemanfaatan Pangan											
Ind Tujuan			Persentase peningkatan luasan lahan pangan lokal yang dikembangkan									
Sasaran	Meningkatnya Keamanan Pangan											
Ind Sasaran			Persentase peningkatan jumlah sampel pangan yang diuji dalam rangka keamanan pangan									
Strategi	Mewujudkan Kedaulatan Pangan dengan meningkatkan pengawasan keamanan pangan											
Kebijakan	Mewujudkan Kedaulatan Pangan dengan meningkatkan pengawasan keamanan pangan											
Program	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN											
Ind Program			Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan									
Kegiatan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan			Jumlah sampel bahan makanan hasil survey yang diuji	Tidak adanya Rekomendasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diterbitkan	209	Dinpartan KP	Kurangnya pengetahuan Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi dalam Negeri Usaha Kecil dan Mikro (PSAT-PDUK) untuk menjaga mutu dan keamanan pangan	Eksternal	C	Tidak terjaminnya keamanan dan mutu Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan yang beredar	Masyarakat	DINPERTAN KP

Ind Kegiatan		Jumlah kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang dilaksanakan	tidak stabilnya pasokan dan harga pangan	209	Dinpertan KP	tidak terlaksananya pasar murah untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan	Eksternal	C	Menurunnya daya beli pangan, meningkatnya harga pangan, menurunnya akses masyarakat terhadap pangan	Masyarakat	DINPERTAN KP
			Gapoktan tidak dapat mengembangkan usaha pangan dan tidak berfungsinya TTI sebagai sarana pemerataan distribusi	209	Dinpertan KP	Kurangnya pembinaan dan bantuan operasional untuk pengembangan usaha pangan masyarakat	Eksternal	UC	Tidak terserapnya gabah petani, tidak meratanya distribusi pangan dan terjadi ketidakstabilan harga pangan	Masyarakat	DINPERTAN KP
			tidak tersedianya data stok, pasokan dan harga pangan yang beredar di masyarakat/pasar	209	Dinpertan KP	tidak terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan yang beredar di masyarakat/pasar	Internal	C	tidak terpantaunya ketersediaan pangan dan kestabilan harga pangan di masyarakat	Masyarakat	DINPERTAN KP
Tujuan	Meningkatnya Produksi Tanaman Pertanian										
Ind Tujuan		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian									
Sasaran	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Pertanian										
Ind Sasaran		Persentase peningkatan ketersediaan sarana pendukung produksi pertanian									
Strategi	Meningkatkan sarana pendukung produksi pertanian										
Kebijakan	Meningkatkan sarana pendukung produksi pertanian										
Program	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN										
Ind Program		Persentase peningkatan jumlah sarana pertanian									
Kegiatan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian										
Ind Kegiatan		Jumlah kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian yang dilaksanakan	Petani belum menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) pada budidaya tanaman pangan	327	Dinpertan KP	Kurangnya pengetahuan petani, serta kurangnya sarana produksi	Internal	C	Produksi dan produktivitas tanaman pangan tidak optimal	Masyarakat (Petani)	DINPERTAN KP
			Petani belum menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) pada budidaya tanaman perkebunan	327	Dinpertan KP	Kurangnya pengetahuan petani, serta kurangnya sarana produksi	Eksternal	C	Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan tidak optimal	Masyarakat (Petani)	DINPERTAN KP
			Tidak terlaksananya tanam serempak pada tanaman padi	327	Dinpertan KP	Ketersediaan alsintan prapanen belum mencukupi bagi kebutuhan pengolahan lahan	Internal	C	Meningkatnya resiko berkembang hama penyakit tanaman disuatu hamoran	Masyarakat (Petani)	DINPERTAN KP

Kegiatan		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian										
Ind Kegiatan			Jumlah kelompok yang naik kelas	Peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan di Kecamatan dan Desa kurang optimal	327	Dinpertan KP	Fasilitas yang tersedia belum difungsikan secara optimal	Internal	C	Terhambatnya proses penyelenggaraan penyuluhan pertanian	BPP	DINPERTAN KP
				Posluhdes belum terbentuk di semua Desa	327	Dinpertan KP	Kurangnya pemahaman peran dan fungsi Posluhdes	Eksternal	C	Kelembagaan Penyuluhan di tingkat Desa belum optimal	Masyarakat	DINPERTAN KP
				Kelembagaan petani kurang berkembang	327	Dinpertan KP	Keterbatasan jumlah SDM Penyuluh pertanian lapangan	Internal	C	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani kurang optimal	Masyarakat (petani)	DINPERTAN KP
				Belum semua BPP mempunyai fasilitas gedung dan lahan demplot	327	Dinpertan KP	Tidak tersedianya lahan /tanah yang merupakan aset Pemda	Eksternal	UC	Kegiatan Penyelenggaraan penyuluhan kurang optimal	Masyarakat (petani)	DINPERTAN KP
Sasaran		Meningkatnya Hasil Penanganan Bencana Pertanian										
Ind Sasaran			Persentase peningkatan penanganan bencana pertanian									
Strategi		Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penanganan bencana pertanian										
Kebijakan		Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penanganan bencana pertanian										
Program		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN										
Ind Program			Persentase kasus bencana Pertanian yang tertangani									
Kegiatan		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota										
Ind Kegiatan			Jumlah kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten yang dilaksanakan	Tidak adanya deteksi dini serangan OPT pada tanaman pertanian	327	Dinpertan KP	Kurangnya kesadaran petani akan perlunya pengamatan serangan OPT	Eksternal	C	Terjadinya ledakan OPT yang berakibat puso	Masyarakat (Petani)	DINPERTAN KP
				Tidak diterapkannya Pengendalian Hama Terpadu	327	Dinpertan KP	Kurangnya pengetahuan petani tentang Pengendalian Hama Terpadu	Eksternal	C	Pengendalian OPT hanya melalui pengendalian secara kimia menggunakan pestisida	Masyarakat (Petani)	DINPERTAN KP
				Meningkatnya resistensi OPT	327	Dinpertan KP	Penggunaan obat-obatan kimia pembasmi OPT dalam jangka waktu yang lama	Eksternal	C	Meningkatnya kerusakan tanaman akibat serangan OPT	Masyarakat (Petani)	DINPERTAN KP
				Tingginya biaya untuk pengendalian OPT	327	Dinpertan KP	Ketergantungan petani menggunakan pestisida kimia	Eksternal	C	Semakin meningkatnya biaya produksi sehingga keuntungan petani semakin rendah	Masyarakat (Petani)	DINPERTAN KP

HASIL ANALISIS RESIKO STARTEGIS OPD

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tidak memadai	RSO.22	209	22	22	3,3	2,6	8,58
2	Tidak tertanganinya daerah rawan pangan	RSO.22	209	22	22	3,2	2,7	8,64
3	Jumlah sampel pangan untuk uji keamanan pangan menurun	RSO.22	209	22	22	2,4	2,5	6
4	penurunan jenis komoditas pangan lokal yang dikembangkan	RSO.22	209	22	22	2,8	2,6	7,28
5	Kurang optimalnya ketersediaan sarana pendukung produksi pertanian	RSO.22	327	22	22	3,1	2,8	8,68
6	Penurunan ketersediaan prasarana pendukung produksi pertanian	RSO.22	327	22	22	3	2,8	8,4
7	Kurang optimalnya pendampingan penyuluh pertanian terhadap kelompok tani	RSO.22	327	22	22	3,2	3,2	10,24
8	Kurang tertanganinya bencana pertanian	RSO.22	327	22	22	3,4	2,6	8,84

HASIL ANALISIS RESIKO OPERASIONAL OPD

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Tidak adanya deteksi dini serangan OPT pada tanaman pertanian	ROO.22	327	22	22	3,3	2,7	8,91
2	Meningkatnya resistensi OPT	ROO.22	327	22	22	3,6	3	10,8
3	Tidak diterapkannya Pengendalian Hama Terpadu	ROO.22	327	22	22	3,4	2,8	9,52
4	Tingginya biaya untuk pengendalian OPT	ROO.22	327	22	22	2,9	3,1	8,99
5	Petani belum menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) pada budidaya tanaman hortikultura	ROO.22	327	22	22	2,8	3	8,4
6	tidak tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan pangan (Food Security and Vulnerability Atlas (FSVa)	ROO.22	209	22	22	2,9	2,3	6,67
7	tidak tersedia, terkelola dan tersalurkannya pangan untuk desa rawan pangan	ROO.22	209	22	22	2,9	2,3	6,67
8	Tidak adanya Rekomendasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diterbitkan	ROO.22	209	22	22	2,8	2,4	6,72
9	Masyarakat tidak mengetahui mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang beredar dan dikonsumsi	ROO.22	209	22	22	2,9	2,8	8,12
10	tidak stabilnya pasokan dan harga pangan	ROO.22	209	22	22	3,3	2,8	9,24
11	Tidak tersedianya data stok, pasokan dan harga pangan yang beredar di masyarakat/pasar	ROO.22	209	22	22	2,8	2,5	7
12	Gapoktan tidak dapat mengembangkan usaha pangan dan tidak berfungsinya TTI sebagai sarana pemerataan distribusi pangan	ROO.22	209	22	22	2,8	2,8	7,84
13	Tidak tersedianya Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMDes)	ROO.22	209	22	22	2,8	2,6	7,28
14	Tidak adanya dokumen penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	ROO.22	209	22	22	2,7	2,3	6,21
15	Tidak terpantau nya konsumsi pangan per kapita per tahun	ROO.22	209	22	22	2,5	2,4	6

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
16	Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pangan dan diversifikasi pangan melalui pemanfaatan pekarangan	ROO.22	209	22	22	2,7	2,8	7,56
17	Petani belum menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) pada budidaya tanaman pangan	ROO.22	327	22	22	3,1	2,6	8,06
18	Petani belum menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) pada budidaya tanaman perkebunan	ROO.22	327	22	22	3	2,8	8,4
19	Tidak terlaksananya tanam serempak pada tanaman padi	ROO.22	327	22	22	2,8	2,9	8,12
20	Belum maksimalnya pemanfaatan alsintan dalam usaha tani	ROO.22	327	22	22	2,8	2,9	8,12
21	Peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan di Kecamatan dan Desa kurang optimal	ROO.22	327	22	22	2,8	2,8	7,84
22	Posluhdes belum terbentuk di semua Desa	ROO.22	327	22	22	2,7	3	8,1
23	Kelembagaan petani kurang berkembang	ROO.22	327	22	22	2,9	3	8,7
24	Belum semua BPP mempunyai fasilitas gedung dan lahan demplot	ROO.22	327	22	22	2,7	3	8,1
25	Tidak tersedianya Jalan Usaha Tani yang memadai	ROO.22	327	22	22	2,7	2,8	7,56
26	Kurang optimalnya ketersediaan infrastruktur sumber-sumber air (irigasi, embung, dam parit, long storage)	ROO.22	327	22	22	3	2,8	8,4

DAFTAR RESIKO PRIORITAS

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
		ROO.22	327	22	22				
1	Tidak adanya deteksi dini serangan OPT pada tanaman pertanian	ROO.22	327	22	22	8,91	DINPERTAN KP	Kurangnya kesadaran petani akan perlunya pengamatan serangan OPT	Terjadinya ledakan OPT yang berakibat puso
2	Meningkatnya resistensi OPT	ROO.22	327	22	22	10,8	DINPERTAN KP	Penggunaan obat-obatan kimia pembasmi OPT dalam jangka waktu yang lama	Meningkatnya kerusakan tanaman akibat serangan OPT
3	Tidak diterapkannya Pengendalian Hama Terpadu	ROO.22	327	22	22	9,52	DINPERTAN KP	Kurangnya pengetahuan petani tentang Pengendalian Hama Terpadu	Pengendalian OPT hanya melalui pengendalian secara kimia menggunakan pestisida
4	Tingginya biaya untuk pengendalian OPT	ROO.22	327	22	22	8,99	DINPERTAN KP	Ketergantungan petani menggunakan pestisida kimia	Semakin meningkatnya biaya produksi sehingga keuntungan petani semakin rendah
5	Petani belum menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) pada budidaya tanaman hortikultura	ROO.22	327	22	22	8,4	DINPERTAN KP	Kurangnya pengetahuan petani, serta kurangnya sarana produksi	Produksi dan produktivitas tanaman hortikultura tidak optimal
6	tidak tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan pangan (Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	ROO.22	209	22	22	6,67	DINPERTAN KP	tidak tersedia data desa rawan pangan	tidak tertanganinya desa rawan pangan
7	tidak tersedia, terkelola dan tersalurkannya pangan untuk desa rawan pangan	ROO.22	209	22	22	6,67	DINPERTAN KP	tidak adanya pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan untuk penanganan kerawanan pangan	tidak tertanganinya desa rawan pangan
8	Tidak adanya Rekomendasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diterbitkan	ROO.22	209	22	22	6,72	DINPERTAN KP	Kurangnya pengetahuan Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi dalam Negeri Usaha Kecil dan Mikro (PSAT-PDUK) untuk menjaga mutu dan keamanan pangan	Tidak terjaminnya keamanan dan mutu Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan yang beredar
9	Masyarakat tidak mengetahui mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang beredar dan dikonsumsi	ROO.22	209	22	22	8,12	DINPERTAN KP	Tidak adanya pengujian mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat	Tidak terjaminnya keamanan pangan yang beredar

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
10	tidak stabilnya pasokan dan harga pangan	ROO.22	209	22	22	9,24	DINPERTAN KP	tidak terlaksananya pasar murah untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan	Menurunnya daya beli pangan, meningkatnya harga pangan, menurunnya akses masyarakat terhadap pangan
11	tidak tersedianya data stok, pasokan dan harga pangan yang beredar di masyarakat/pasar	ROO.22	209	22	22	7	DINPERTAN KP	tidak terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan yang beredar di masyarakat/pasar	tidak terpantaunya ketersediaan pangan dan kestabilan harga pangan di masyarakat
12	Gapoktan tidak dapat mengembangkan usaha pangan dan tidak berfungsinya TTI sebagai sarana pemerataan distribusi pangan	ROO.22	209	22	22	7,84	DINPERTAN KP	Kurangnya pembinaan dan bantuan operasional untuk pengembangan usaha pangan masyarakat	Tidak terserapnya gabah petani, tidak meratanya distribusi pangan dan terjadi ketidakstabilan harga pangan
13	Tidak tersedianya Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMDes)	ROO.22	209	22	22	7,28	DINPERTAN KP	Tidak terbangunnya LPMDes	tidak meningkatnya jumlah cadangan pangan masyarakat dan tidak meningkatnya fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan
14	Tidak adanya dokumen penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	ROO.22	209	22	22	6,21	DINPERTAN KP	Kurangnya data konsumsi pangan per kapita per tahun	tidak adanya data untuk acuan perencanaan konsumsi pangan masyarakat
15	Tidak terpantau nya konsumsi pangan per kapita per tahun	ROO.22	209	22	22	6	DINPERTAN KP	Kurangnya data konsumsi pangan per kapita per tahun	tidak adanya data untuk acuan perencanaan konsumsi pangan masyarakat
16	Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pangan dan diversifikasi pangan melalui pemanfaatan pekarangan	ROO.22	209	22	22	7,56	DINPERTAN KP	Tidak adanya perluasan pekarangan untuk pengembangan pangan dan diversifikasi pangan	konsumsi pangan lokal tidak terpenuhi dan kurangnya gizi masyarakat
17	Petani belum menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) pada budidaya tanaman pangan	ROO.22	327	22	22	8,06	DINPERTAN KP	Kurangnya pengetahuan petani, serta kurangnya sarana produksi	Produksi dan produktivitas tanaman pangan tidak optimal

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
18	Petani belum menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) pada budidaya tanaman perkebunan	ROO.22	327	22	22	8,4	DINPERTAN KP	Kurangnya pengetahuan petani, serta kurangnya sarana produksi	Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan tidak optimal
19	Tidak terlaksananya tanam serempak pada tanaman padi	ROO.22	327	22	22	8,12	DINPERTAN KP	Ketersediaan alsintan prapanen belum mencukupi bagi kebutuhan pengolahan lahan	Meningkatnya resiko berkembang hama penyakit tanaman disuatu hampan
20	Belum maksimalnya pemanfaatan alsintan dalam usaha tani	ROO.22	327	22	22	8,12	DINPERTAN KP	Topografi lahan yang tidak memungkinkan untuk pengoperasian alsintan	Biaya produksi yang tinggi
21	Peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan di Kecamatan dan Desa kurang optimal	ROO.22	327	22	22	7,84	DINPERTAN KP	Fasilitas yang tersedia belum difungsikan secara optimal	Terhambatnya proses penyelenggaraan penyuluhan pertanian
22	Posluhdes belum terbentuk di semua Desa	ROO.22	327	22	22	8,1	DINPERTAN KP	Kurangnya pemahaman peran dan fungsi Posluhdes	Kelembagaan Penyuluhan di tingkat Desa belum optimal
23	Kelembagaan petani kurang berkembang	ROO.22	327	22	22	8,7	DINPERTAN KP	Keterbatasan jumlah SDM Penyuluh pertanian lapangan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani kurang optimal
24	Belum semua BPP mempunyai fasilitas gedung dan lahan demplot	ROO.22	327	22	22	8,1	DINPERTAN KP	Tidak tersedianya lahan /tanah yang merupakan aset Pemda	Kegiatan Penyelenggaraan penyuluhan kurang optimal
25	Tidak tersedianya Jalan Usaha Tani yang memadai	ROO.22	327	22	22	7,56	DINPERTAN KP	Belum terfasilitasinya pembangunan Jalan usaha Tani sesuai kebutuhan	Rendahnya keuntungan usaha tani akibat mahalnya biaya pengangkutan sarana produksi maupun hasil panen
26	Kurang optimalnya ketersediaan infrastruktur sumber-sumber air (irigasi, embung, dam parit, long storage)	ROO.22	327	22	22	8,4	DINPERTAN KP	Fasilitasi pembangunan sumber-sumber air belum optimal	Air irigasi tidak sampai ke lahan pertanian terlebih pada musim kemarau sehingga produksi tanaman tidak optimal

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN ATAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI						
	LHE SAKIP						
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF						
	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	Adanya pembinaan pengelolaan resiko untuk pencapaian tujuan organisasi	KE	1	Komitment seluruh pegawai terhadap pengelolaan resiko	Kepala Dinas	1 tahun
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT						
	Kewenangan direviu secara periodik	Pendelegasian wewenang dilakukan saat belum ada pejabat yang definitif	KE	1	Pembahasan pendelegasian wewenang dilakukan secara periodik setiap awal tahun anggaran	Kepala Dinas	1 tahun
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA						
	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	Pemberian punishment bagi pegawai yang tidak melakukan pengelolaan risiko sesuai tugasnya	KE	1	Pemberian reaward dan punishment sesuai tingkat keberhasilan pengelolaan risiko secara beimbang	Kepala Dinas	1 tahun
	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	Penambahan SDM untuk memenuhi kekurangan pegawai	KE	1	Peningkatan kompetensi pegawai yang ada melalui pelatihan dan bimbingan teknis sesuai kebutuhan	Kepala Dinas	1 tahun

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Tidak tertanganinya daerah rawan pangan		Pemberian bantuan sembako bagi masyarakat di daerah rawan pangan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan penanganan daerah rawan pangan melalui pemanfaatan lumbung pangan	Kepala Bidang Ketahanan pangan	1 tahun
2	Kurang optimalnya pendampingan penyuluh pertanian terhadap kelompok tani		Pendampingan kepada kelompok tani oleh Penyuluh di wilayah binaannya	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Peningkatan kompetensi penyuluh untuk melakukan pendampingan melalui pelatihan dan bimbingan teknis	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha	Triwulan I, II
3	Kurang tertanganinya bencana pertanian		Pemberian bantuan pestisida untuk pengendalian OPT secara intensif	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pelaksanaan pemantauan kegiatan pengendalian hama terpadu	Kepala Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman	Triwulan I, II, III, IV

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	tidak stabilnya pasokan dan harga pangan		Melakukan pendataan stok dan harga pangan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait perihal data stok dan harga pangan	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	1 tahun
2	Petani belum menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) pada budidaya tanaman pangan		Mengadakan bintek dan pelatihan teknis budidaya	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Bintek dan pelatihan teknis budidaya lebih dititik beratkan pada aplikasinya di lapangan	Kepala Bidang tanaman pangan dan Hortikultura	1 tahun
3	Tidak terlaksananya tanam serempak pada tanaman padi		Merekomendasikan tanam serempak pada tanaman padi	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Sosialisasi pentingnya tanam serempak kaitannya dengan pengendalian OPT	Kepala Bidang tanaman pangan dan Hortikultura	1 tahun
4	Kelembagaan petani kurang berkembang		Pembinaan kelembagaan petani melalui penyuluh di wilayah binaan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Fasilitasi pembinaan kelembagaan petani oleh Dinperten KP	Kepala Bidang penyuluhan dan Bina Usaha	1 tahun

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Melakukan penanganan daerah rawan pangan melalui pemanfaatan lumbung pangan	Sosialisasi pemanfaatan lumbung pangan	Dinpertan KP, instansi terkait	Masyarakat di daerah rawan pangan	Triwula I, II, III, IV	-	Belum dilaksanakan
2	Peningkatan kompetensi penyuluh untuk melakukan pendampingan melalui pelatihan dan bimbingan teknis	Surat, Rapat Koordinasi, Pelatihan/Bintek	Dinpertan KP, BPPSDMP	Penyuluh Pertanian	Triwulan I, II, III, IV	-	Belum dilaksanakan
3	Pelaksanaan pemantauan kegiatan pengendalian hama terpadu	Bintek/Pelatihan/Sekolah Lapang	Penyuluh/POPT	Petani	Triwulan I, II, III, IV	-	Belum dilaksanakan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
1	Melakukan penanganan daerah rawan pangan melalui pemanfaatan lumbung pangan	Laporan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Triwulan I, II, III, IV	-	Belum dilaksanakan
2	Peningkatan kompetensi penyuluh untuk melakukan pendampingan melalui pelatihan dan bimbingan teknis	Pelatihan/Bintek	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan	Triwulan I, II, III, IV	-	Belum dilaksanakan
3	Pelaksanaan pemantauan kegiatan pengendalian hama terpadu	Pelatihan/Bimbingan Teknis/Sekolah Lapang	Kepala Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman	Triwulan I, II, III, IV	-	Belum dilaksanakan

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait perihal data stok dan harga pangan					
2	Bintek dan pelatihan teknis budidaya lebih dititik beratkan pada aplikasinya di lapangan					
3	Sosialisasi pentingnya tanam serempak kaitannya dengan pengendalian OPT					
4	Fasilitasi pembinaan kelembagaan petani oleh Dinperten KP	Pelatihan bagi pengurus Poktan/Gapoktan	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha	Triwulan I, II, III, IV	-	Belum dilaksanakan

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	Tidak tertanganinya daerah rawan pangan	RSO.21.209.22.22					Melakukan penanganan daerah rawan pangan melalui pemanfaatan lumbung pangan	1 tahun		
2	Kurang optimalnya pendampingan penyuluh pertanian terhadap kelompok tani	RSO.21.327.22.22					Peningkatan kompetensi penyuluh untuk melakukan pendampingan melalui pelatihan dan bimbingan teknis	Triwulan I, II		
3	Kurang tertanganinya bencana pertanian	RSO.21.327.22.22					Pelaksanaan pemantauan kegiatan pengendalian hama terpadu	Triwulan I, II, III, IV		

Entitas:

01. PEMKAB BANYUMAS02. DINDIK03. DINKES04. RSUD BANYUMAS05. RSUD AJIBARANG06. DPU07. DINPERKIM08. BPBD09. KESBANGPOL10. SATPOL PP11. DINSOSPERMASDES12. DINAKERKOP UKM13. DLH14. DINDUKCAPIL15. DPPKBP3A16. DINHUB17. DINKOMINFO18. DPMPTSP19. DINPORABUDPAR20. DINARPUSDA21. DINKANNAK22. DINPERTAN KP23. DINPERINDAG24. SETDA25. SETWAN26. INSPEKTORAT27. KEC. AJIBARANG28. KEC. BANYUMAS29. KEC. BATURRADEN30. KEC. CILONGOK31. KEC. GUMELAR32. KEC. JATILAWANG33. KEC. KALIBAGOR34. KEC. KARANGLEWAS35. KEC. KEBASEN36. KEC. KEDUNGBANTENG37. KEC. KEMBARAN38. KEC. KEMRANJEN39. KEC. LUMBIR40. KEC. PATIKRAJA41. KEC. PEKUNCEN42. KEC. PURWOJATI43. KEC. PWT BARAT44. KEC. PWT SELATAN45. KEC. PWT TIMUR46. KEC. PWT UTARA47. KEC. RAWALO48. KEC. SOKARAJA49. KEC. SOMAGEDDE50. KEC. SUMBANG51. KEC. SUMPIUH52. KEC. TAMBAK53. KEC. WANGON54. BAPPEDA LITBANG55. BAPENDA56. BKAD57. BKPSDM

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	Kelembagaan petani kurang berkembang	ROO.21.327.22.22					Fasilitasi pembinaan kelembagaan petani oleh Dinperten KP	1 tahun		
2	Petani belum menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) pada budidaya tanaman pangan	ROO.21.327.22.22					Bintek dan pelatihan teknis budidaya lebih dititik beratkan pada aplikasinya di lapangan	1 tahun		
3	tidak stabilnya pasokan dan harga pangan	ROO.21.209.22.22					Melakukan koordinasi dengan instansi terkait perihal data stok dan harga pangan	1 tahun		
4	Tidak terlaksananya tanam serempak pada tanaman padi	ROO.21.327.22.22					Sosialisasi pentingnya tanam serempak kaitannya dengan pengendalian OPT	1 tahun		